



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Aktivitas Diplomasi Digital Pemerintah Jepang pasca
Bencana Alam The Great East Japan Earthquake 2011-
2016**

Skripsi

Oleh
Milly Marsha Viandrina
2012330035

Bandung
2017



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Aktivitas Diplomasi Digital Pemerintah Jepang pasca
Bencana Alam The Great East Japan Earthquake 2011-
2016**

Skripsi

Oleh

Milly Marsha Viandrina
2012330035

Pembimbing

Albert Triwibowo, M.A.

Bandung

2017



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Milly Marsha Viandrina
Nomor Pokok : 2012330035
Judul : Aktivitas Diplomasi Digital Pemerintah Jepang pasca Bencana Alam The Great East Japan Earthquake 2011-2016

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 17 Juli 2017
Dan dinyatakan LULUS



Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sapta Dwikardana, Ph.D.

: 

Sekretaris

Albert Triwibowo, S.IP., MA.

: 

Anggota

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Milly Marsha Viandrina

NPM : 2012330035

Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : Aktivitas Diplomasi Digital Pemerintah Jepang pasca Bencana Alam
The Great East Japan Earthquake 2011-2016.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan penelitian karya tulis saya sendiri, dengan penuh rasa tanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan plagiarisme. Kutipan yang terdapat dalam penelitian ini ditulis berdasarkan aturan penulisan yang berlaku. Apabila terbukti melakukan tindakan plagiarisme, maka penulis bersedia menerima konsekuensi berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku.

Bandung, 10 Juli 2017



Milly Marsha viandrina

2012330035

ABSTRAK

Nama : Milly Marsha Viandrina
NPM : 2012330035
Judul Skripsi : Aktivitas Diplomasi Digital Pemerintah Jepang pasca
Bencana Alam
The Great East Japan Earthquake 2011-2016

Jepang merupakan negara yang secara konsisten mempertahankan budaya tradisional disamping berkembangnya teknologi modern di era globalisasi. Pemerintah Jepang melakukan aktivitas diplomasi digital menggunakan media sosial twitter (@JPN_PMO), facebook (@Japan.PMO) dan youtube (PMOJapan) dalam menghadapi bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011-2016.

Penelitian ini memfokuskan pada aktivitas diplomasi digital Pemerintah Jepang pasca bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011. Penelitian ini juga mengacu pada Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Jepang dalam upaya revitalisasi wilayah Fukushima pasca bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011. Dalam menganalisa aktivitas diplomasi digital Pemerintah Jepang, penelitian ini menggunakan konsep diplomasi digital yang terbagi menjadi dua kategori aktivitas, yaitu: *agenda-setting* dan *presence-expansion*.

Kata kunci: Diplomasi digital, Bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011, *agenda-setting*, *presence expansion*

ABSTRACT

Name : Milly Marsha Viandrina
NPM : 2012330035
Research Topic : The Government of Japan Digital Diplomacy Activity on the aftermath of natural disaster The Great East Japan Earthquake 2011-2016.

Japan is a country which consistently maintains traditional culture in addition with the development of modern technology in the globalization era. The Government of Japan is conducting digital diplomacy activities using social media, namely: Twitter (@JPN_PMO), Facebook (@ Japan.PMO) and Youtube (PMOJapan) in dealing with the aftermath of natural disaster The Great East Japan Earthquake 2011-2016.

This research focusing on The Government of Japan digital diplomacy activities on the aftermath of natural disaster The Great East Japan Earthquake 2011. This research also referring to Foreign Policy of The Government of Japan in the Revitalization of Fukushima areas after The Great East Japan Earthquake 2011 natural disaster. In analyzing the digital diplomacy activities of The Government of Japan, this research using the concept of digital diplomacy which is divided into two categories of activities, such as: agenda-setting and presence-expansion.

Keywords: Digital diplomacy, The Great East Japan Earthquake 2011, agenda-setting, presence-expansion

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih disampaikan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya dalam memudahkan penulis menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “AKTIVITAS DIPLOMASI DIGITAL PEMERINTAH JEPANG PASCA BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI THE GREAT EAST JAPAN EARTHQUAKE 2011-2016”

Dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan yang penulis hadapi untuk menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan pada dosen pembimbing Bapak Albert Triwibowo yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan masukan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Sapta Dwikardana, Ph.D selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan membantu penulis dalam memberikan surat rekomendasi untuk program pertukaran pelajar ke Universitas Hiroshima, Jepang tahun 2015-2016.
- Bapak I Nyoman Sudira yang telah membantu memberikan saran terhadap topik skripsi mengenai politik luar negeri, resolusi konflik dan diplomasi perdamaian Jepang.
- Ibu Ida Susanti, Ibu Ratih dan Staff International Office UNPAR yang telah membantu penulis dalam proses program pertukaran pelajar ke Universitas Hiroshima, Jepang.
- Kepada Orang Tua yang selalu menjadi inspirasi, memotivasi dan mendoakan dengan tulus agar penulis mendapat kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Prof. Yamane-Sensei selaku Akademik Supervisor di IDEC, Universitas Hiroshima yang telah membantu memberikan saran dalam proses pembuatan riset proposal.

- Tsunematsu-Sensei selaku Ketua Program Pertukaran Pelajar (HUSA) Universitas Hiroshima yang telah memberi saran penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya.
- Sahabat Terbaik semasa penulis berkuliah di Jepang (Adelia, Hanni, Rusdi, Reza, Lala, Maria, Leigh, Nicola, Franca, Yasuka, Fujii Mie, Natsumi, Aki Maruo, teman-teman keluarga PPI Hiroshima dan teman-teman Program HUSA 2015/2016).
- Bapak Agus Heryana, Bapak Agus Badruljamal, dan Bapak Arif Suyoko dari Direktorat Kementerian Luar Negeri RI yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan mengenai topik skripsi dan memotivasi penulis agar melanjutkan studi terkait diplomasi digital.
- Ibu Siti dan Ibu Diana dari Divisi Hubungan Internasional, INTERPOL Indonesia yang telah menyemangati dan memotivasi penulis untuk terus meraih cita-cita.
- Teman-teman Terbaik (Indah, Tesa, Devi, Ovi, Nadia, Sagita, Sabilla, Luna, Luthfi dan Almer) yang telah menyemangati penulis selama menjalankan masa perkuliahan di FISIP UNPAR.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Surat Pernyataan | i |
| Abstrak | ii |
| <i>Abstract</i> | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | v |
| BAB I | 1 |
| Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 5 |
| 1.2.1 Pembatasan Masalah | 6 |
| 1.2.2 Perumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1.4 <i>Literature Review</i> | 8 |
| 1.5 Kerangka Pemikiran | 12 |
| 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data | 18 |

| | | |
|---|--|----|
| 1.6.1 | Metode Penulisan | 18 |
| 1.6.1.1 | Konten Analisis | 19 |
| 1.6.2 | Jenis Penelitian | 20 |
| 1.6.3 | Teknik Pengumpulan Data | 20 |
| 1.7 | Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II | | 22 |
| Diplomasi Pemerintah Jepang | | 22 |
| 2.1 | Kepentingan Nasional Jepang | 22 |
| 2.2 | Diplomasi Jepang pada Tahun 1950-1990..... | 24 |
| 2.3 | Diplomasi Jepang pada Tahun 1990-2007..... | 27 |
| 2.4 | Diplomasi Jepang pada Tahun 2007-Sekarang..... | 30 |
| 2.5 | Digitalisasi dalam Diplomasi Jepang..... | 33 |
| BAB III | | 36 |
| Bencana Alam The Great East Japan Earthquake 2011 | | 36 |
| 3.1 | Kondisi sebelum bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011 | 36 |
| 3.2 | Kondisi sesudah bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011..... | 39 |
| 3.3 | Respon Pemerintah Jepang dalam menghadapi Bencana Alam The Great East Japan Earthquake 2011..... | 45 |

| | |
|---|----|
| 3.4 Respon Publik terhadap Bencana Alam The Great East Japan Earthquake 2011..... | 47 |
| BAB. IV | 51 |
| Aktivitas Diplomasi Digital Pemerintah Jepang pasca Bencana Alam The Great East Japan Earthquake Tahun 2011-2016 | 51 |
| 4.1 Kebijakan Luar Negeri Jepang dalam upaya revitalisasi wilayah Fukushima pasca bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011..... | 52 |
| 4.2 Aktivitas Diplomasi Digital Pemerintah Jepang terkait bencana alam The Great East Japan Earthquake melalui media sosial twitter, facebook, dan youtube..... | 55 |
| 4.3 Aktivitas diplomasi digital Pemerintah Jepang dalam <i>Agenda-setting</i> | 59 |
| 4.4 Aktivitas Diplomasi Digital Pemerintah Jepang dalam <i>Presence-expansion</i> | 68 |
| BAB V | 93 |
| Kesimpulan | 93 |
| Daftar Pustaka | 97 |

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Aktivitas Diplomasi Digital Pemerintah Jepang melalui media sosial twitter (@JPN_PMO) tahun 2011-2016 | 68 |
| Tabel 2 Aktivitas Diplomasi Digital Pemerintah Jepang melalui media sosial youtube (@PMOJapan) tahun 2014-2016 | 72 |
| Tabel 2 Aktivitas Diplomasi Digital Pemerintah Jepang melalui media sosial facebook (@Japan.PMO) tahun 2011-2016 | 75 |

Daftar Gambar

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Akun resmi media sosial twitter Pemerintah Jepang <i>Prime Minister's Office of Japan</i> (@JPN_PMO) | 57 |
| Gambar 2 Akun resmi media sosial facebook Pemerintah Jepang <i>Prime Minister's Office of Japan</i> (@Japan.PMO) | 58 |
| Gambar 3 Akun resmi media sosial youtube Pemerintah Jepang <i>Prime Minister's Office of Japan</i> (PMOJapan) | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki upaya untuk mempererat hubungan dengan negara lain dalam mengatasi permasalahan maupun konflik antar negara. Negara melakukan penyampaian pesan diplomatik menggunakan sarana komunikasi, berupa: surat, telegram dan nota diplomatik. Abad ke-19 memberikan pengaruh dalam perkembangan diplomasi yang berkaitan dengan opini publik terhadap proses pengambilan keputusan oleh aktor-aktor pemerintah.¹ Globalisasi memunculkan adanya bentuk diplomasi baru atau diplomasi multijalur yang dilakukan oleh aktor pemerintah maupun non-pemerintah.

Era globalisasi dan revolusi teknologi informasi memberikan pengaruh dalam praktik diplomasi internasional yang ditandai dengan perubahan penyampaian informasi secara signifikan. Hal ini menyebabkan eksklusivitas informasi tidak lagi menjadi dominan aktor-aktor diplomatik resmi pemerintah. Diplomasi jalur pertama memiliki keterbatasan karena bergerak dalam kerangka kekuasaan dan interaksi yang kaku.² Seiring dengan perkembangan revolusi teknologi, dinamika jangkauan publik yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri perlahan berubah. Dalam merespon hadirnya bentuk komunikasi dalam era modern, munculnya revolusi teknologi dan

¹ Sukawarsini Djelantik, "Diplomasi antara Teori & Praktik," (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) 58

² Ibid, p.73

informasi melatarbelakangi penerapan bentuk penyampaian pesan diplomatik melalui surat elektronik dan internet.

Negara-negara sebelumnya terhubung oleh Kementerian Luar Negeri dan aktivitas perdagangan untuk menyampaikan informasi dalam pelaksanaan hubungan diplomatik.³ Munculnya teknologi informasi dan komunikasi telah mendasari perubahan cara-cara yang dilakukan oleh negara dalam melaksanakan hubungan diplomatik. Perkembangan revolusi teknologi mempermudah akses komunikasi dalam melaksanakan kegiatan diplomatik secara efektif. Sebelumnya, aktor yang terlibat dalam pelaksanaan hubungan diplomatik adalah aktor pemerintah melalui perwakilan resmi. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, aktor non-pemerintah dapat terlibat dalam menyampaikan pendapat terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Dengan pemahaman ini, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan komunikasi informasi dengan memanfaatkan surat kabar, majalah, TV, internet dan media lainnya untuk memfasilitasi komunikasi secara efektif.⁴ Dalam pelaksanaan diplomasi modern, bentuk penyampaian informasi menggunakan instrumen internet dan media sosial dikenal dengan istilah diplomasi digital. Penggunaan internet dan media sosial dalam diplomasi pertama kali dicetuskan oleh Hillary Clinton⁵ dengan membentuk

³ Sukawarsini Djelantik, "Diplomasi antara Teori dan Praktik" *op.cit* p.16

⁴ Ministry of Foreign Affairs (MOFA) Japan, "Japan's Foreign Policy to Promote National and Worldwide Interests" (Japan: MOFA Diplomatic Bluebook, 2011) 17-26

⁵ Hilary Clinton merupakan Sekretaris Negara untuk Amerika Serikat dibawah masa pemerintahan Presiden Barack Obama.

departemen khusus diplomasi digital dalam Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Departemen Diplomasi Digital Amerika Serikat, meliputi: *Corridor*, *Communities@State* dan *Diplopedia*⁶ yang masing-masing bertujuan untuk menciptakan ruang bagi aktor pemerintah dan non-pemerintah secara virtual melalui penggunaan internet dan media sosial.

Penerapan diplomasi digital di Amerika Serikat melalui Departemen Diplomasi Digital secara khusus menangani informasi terkait isu-isu strategis diluar politik dan budaya, seperti *cyber-crime* dengan meningkatkan kerjasama antar institusi atau *counterpart* dalam menyebarkan informasi.⁷ Hal serupa juga diterapkan oleh negara Kanada melalui Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan (DFATD Canada) dan Inggris melalui Departemen Hubungan Luar Negeri dan Negara Persemakmuran atau *Foreign and Commonwealth Office* (FCO) dalam melaksanakan kegiatan diplomatik menggunakan instrumen internet dan media sosial twitter.⁸

Negara lain yang menerapkan diplomasi digital adalah negara-negara Timur Tengah dalam fenomena *Arab Spring*. Publik di negara Tunisia menggunakan media sosial untuk menarik kesadaran publik di negara lain tentang situasi dan kondisi internal yang terjadi dalam negaranya. Media sosial yang digunakan publik, memicu

⁶ Sabrina Sotiriu, "Digital Diplomacy – Between promises and reality." in *Digital Diplomacy Theory and Practice*, ed.

Corneliu Bjola and Marcus Holmes (New York: Routledge, 2015) 39-40

⁷ Sabrina Sotiriu, "Digital Diplomacy – Between promises and reality." *op.cit*

⁸ Amanda Clarke, "Business As Usual? An Evaluation of British and Canadian Digital Diplomacy as policy change." in *Digital*

Diplomacy Theory and Practice, ed.Corneliu Bjola and Marcus Holmes (New York: Routledge, 2015)

terjadinya pemberontakan terhadap pemerintah dalam fenomena *Arab Spring* di tahun 2011. Komunikasi yang dilakukan antar individu melalui media dikendalikan oleh negara dalam rezim opresif sehingga pesan yang disampaikan terdistorsi. Publik di negara Tunisia kemudian melakukan pemberontakan dan memobilisasi masa menggunakan platform media sosial tanpa melibatkan peran Pemerintah.⁹

Penggunaan media sosial di negara-negara Timur Tengah masih terus berlanjut sehingga pengguna media sosial secara aktif memberikan reaksi terhadap fenomena *Arab Spring*. Pemerintah yang lebih responsif di negara Arab mencoba memanfaatkan pertumbuhan penggunaan media sosial di kalangan masyarakat dengan menerapkan pedoman dan kebijakan baru.¹⁰ Media sosial telah memainkan peran yang semakin meningkat dalam perkembangan politik, sosial dan ekonomi di wilayah Arab. Diplomasi digital dalam hal ini berperan dalam meningkatkan kesadaran dan menghubungkan langsung publik di negara tersebut dengan publik di negara lain.

⁹ Racha Mourtada and Fadi Salem, “Arab Social Media Report Vol.1, No.2” (Dubai UAE: Dubai School of Government, May 2011) 24

¹⁰ Racha Mourtada and Fadi Salem, “Arab Social Media Report Vol.1, No.2” *op.cit*

1.2 Identifikasi Masalah

Bentuk penyebaran informasi melalui media sosial juga dilakukan oleh negara lain, seperti: Jepang dalam penanggulangan bencana tsunami dan gempa. Pada umumnya, negara menginformasikan pada publik secara langsung mengenai langkah-langkah dan tindakan preventif dalam menanggulangi bencana. Dalam pelaksanaan diplomasi, negara mengirimkan nota diplomatik melalui surat, telepon, maupun surat elektronik di era globalisasi untuk menginformasikan situasi dan kondisi yang terjadi saat bencana berlangsung. Akan tetapi, saat terjadinya bencana memungkinkan adanya hambatan komunikasi dalam menginformasikan situasi dan kondisi yang terjadi.

Jepang menggunakan media sosial twitter sebagai sarana informasi *real-time* dalam memperbaharui perkembangan situasi dan kondisi saat gempa. Tindakan yang dilakukan Jepang merupakan hal baru dalam menghadapi bencana untuk menginformasikan secara langsung kepada publik mengenai situasi dan kondisi pasca gempa Kementerian Luar Negeri Jepang berusaha secara efektif dengan memanfaatkan internet dan media sosial untuk mengkomunikasikan informasi secara akurat, cepat dan mudah dimengerti pada masyarakat maupun publik di negara lain.¹¹ Meskipun demikian, pelaksanaan diplomasi yang dilakukan Jepang menggunakan instrumen internet dan media sosial tidak merubah pelaksanaan diplomasi tradisional jalur pertama antar aktor-aktor pemerintah.

¹¹ Ministry of Foreign Affairs (MOFA) Japan, "Japan's Foreign Policy to Promote National and Worldwide Interests" *op.cit*

1.2.1 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yang akan penulis paparkan adalah mengenai aktivitas diplomasi digital yang dilakukan oleh Jepang selama jangka waktu lima tahun (2011-2016). Periode waktu ini dipilih berdasarkan awal mula terjadinya bencana alam The Great East Japan Earthquake pada tanggal 11 Maret 2011, hingga kunjungan terakhir Perdana Menteri Shinzo Abe ke wilayah Fukushima pada tanggal 6 Juni 2016. Pemerintah Jepang menggunakan media sosial twitter (@JPN_PMO), facebook (@Japan.PMO) dan youtube (@PMOJapan) pasca terjadinya bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011 sebagai upaya menginformasikan aktivitas diplomasi digital pada publik secara langsung dan mudah dipahami.

1.2.2 Perumusan Masalah

Di dalam penelitian ini penulis akan merumuskan permasalahan yang terjadi dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang akan penulis paparkan, adalah **“Seperti apa aktivitas diplomasi digital yang dilakukan Pemerintah Jepang pasca Bencana Alam The Great East Japan Earthquake 2011?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas diplomasi digital yang dilakukan Pemerintah Jepang dalam upaya revitalisasi pasca bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011 dan sebagai bahan referensi terkait diplomasi digital di negara Jepang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penelitian diplomasi maupun komunikasi internasional serta dapat menjadi bahan referensi dalam kajian penulisan mengenai diplomasi digital.

1.4 Literature Review

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain; Riset yang dilakukan oleh David Bollier dalam buku yang berjudul *The Rise of Netpolitik - How the Internet Is Changing International Politics and Diplomacy* yang menjelaskan adanya fenomena diplomasi antar negara melalui internet atau *Netpolitik*.¹² Seiring meningkatnya jaringan informasi dan

¹² David Bollier, "The Rise of Netpolitik - How the Internet Is Changing International Politics and Diplomacy"
(Washington DC: The Aspen Institute, 2003) 2

internet, hal ini dapat mempermudah negara dalam membuat kebijakan dengan lebih cepat. Jaringan internet menghadirkan fleksibilitas dalam membagi dan menerima informasi. Kelebihan dari riset ini adalah informasi data secara eksplisit menjelaskan pengaruh dan dampak internet terhadap suatu negara. Munculnya fenomena baru merubah tatanan politik dan menghadirkan pola pelaksanaan diplomasi digital. Kekurangan dari riset ini adalah perlu dibaca berulang kali untuk dapat memahami riset ini secara lebih dalam.

Pembahasan mengenai diplomasi twitter juga terdapat dalam riset yang dilakukan oleh Andreas Sandre dalam bukunya yang berjudul *Twitter for Diplomats*. Pertama, di dalam riset yang dilakukan oleh Andreas Sandre menganalisis tentang pergeseran bentuk diplomasi tradisional. Media sosial menghadirkan era baru yang disebut diplomasi digital, atau dengan kata lain: e-diplomasi maupun *twiplomacy*.¹³ Diplomat melalui twitter menyampaikan informasi mengenai kebijakan luar negeri yang kemudian membentuk opini publik. Presiden Obama dan Sekretaris Negara Hillary Clinton pada tanggal 14 Juni tahun 2012 melakukan diplomasi twitter. Hillary Clinton melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat di berbagai negara menggunakan media sosial twitter, sebagai: instrumen negara untuk melakukan hubungan bilateral. Diplomasi digital yang dilakukan Amerika Serikat adalah melalui upaya '*pivot to the*

¹³ Andreas Sandre, "Diplomacy in the Internet Era – Twitter for Diplomats" (Switzerland: DiploFoundation, 2013) 9

people' dengan mengubah pola interaksi yang dilakukan oleh negara dengan negara maupun pemerintah dengan masyarakat.

Penetrasi media sosial twitter ditunjukkan oleh jumlah pengguna twitter, seperti: Perdana Menteri, ahli politik, aktivis, maupun masyarakat sebanyak 4.000 akun twitter di 120 negara pada tahun 2012. Perdana Menteri Italia Giulio Terzi menggunakan media sosial twitter sejak tahun 2011 sebagai alat untuk mempermudah penyampaian kebijakan luar negeri pada publik agar mudah dipahami.¹⁴ Melalui majalah *Forbes* pada bulan Desember tahun 2010, Dino Patti Djalal sebagai diplomat pertama di Indonesia yang menggunakan media sosial twitter sebagai wadah interaksi, penyampaian pandangan dari berbagai perspektif serta mengajarkan budaya dan bahasa Indonesia.

Kelebihan dari riset ini adalah data dan fakta-fakta yang ditunjukkan secara spesifik serta jelas penyampaiannya dari pergeseran pola diplomasi tradisional yang perlahan menjadi diplomasi digital. Riset ini juga meneliti jumlah negara yang menggunakan twitter sebagai instrumen kebijakan luar negeri serta penggunaan media sosial twitter oleh diplomat di seluruh dunia. Kekurangan dari riset ini adalah kurang menjelaskan dampak negatif adanya pengaruh media sosial twitter dengan munculnya berbagai fenomena yang dapat mengubah kebijakan luar negeri maupun opini publik terhadap suatu negara.

¹⁴ Andreas Sandre, "Diplomacy in the Internet Era – Twitter for Diplomats" *op.cit*

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Nicholas Westcott berjudul *Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations*, menjelaskan mengenai dampak internet dalam Hubungan Internasional. Internet berdampak pada aktivitas pembuatan kebijakan antar negara menjadi lebih cepat dan efektif bagi pemerintah dan warga negaranya di dalam maupun di luar negeri.¹⁵ Diplomasi digital yang dibahas dalam riset ini, meliputi: bentuk penyampaian informasi yang mempengaruhi cara yang dilakukan oleh Diplomat dan Menteri Luar Negeri dengan menghadirkan bentuk komunikasi secara fleksibel. Bentuk komunikasi dengan melintasi batas negara menggunakan surat-elektronik atau *e-mail* serta informasi Kedutaan yang tersedia secara daring. Jaringan atau *networking* dengan hadirnya internet dapat membantu meningkatkan peran pemerintah dan *stakeholders* dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Kelebihan dari riset ini adalah penjelasan secara eksplisit mengenai globalisasi, negara dan internet yang memberi dampak positif dan negatif dalam Hubungan Internasional. Internet membantu mobilitas diaspora untuk berkomunikasi dengan komunitas antar negara dan menjadi aktor dalam politik nasional maupun internasional dan internet dapat memperkuat pengaruh aktor non-negara dalam negosiasi perdagangan internasional.

¹⁵ Nicholas Westcott, "Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations" (Oxford Internet Institute: 16 July 2008) 2

Terakhir, riset yang dilakukan oleh Kazuo Ogura yaitu *Japan's Cultural Diplomacy, Past and Present* menjelaskan pengaruh politik negara Jepang melalui diplomasi budaya sebagai bentuk kebijakan luar negeri. Kebijakan pemerintah Jepang dalam meningkatkan pertukaran budaya dan pendidikan yang dinilai efektif untuk memperluas diplomasi publik Jepang.¹⁶ Diplomasi publik dalam riset ini diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mempengaruhi opini internasional terhadap kebijakan domestik dan luar negeri melalui aktivitas antar negara melalui kelompok masyarakat maupun media. Kelebihan dari riset ini adalah menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah Jepang dalam meningkatkan citra negara melalui Pusat Kebudayaan dan Bahasa Jepang. Namun, kekurangan dalam riset ini adalah penjelasan kurang spesifik dalam membahas keadaan Jepang pasca upaya meningkatkan citra melalui diplomasi publik dan budaya.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Teori Diplomasi

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan diplomasi. Kepentingan nasional terdiri dari ekspresi nilai-nilai yang

¹⁶ Kazuo Ogura, "Japan's Cultural Diplomacy, Past and Present" (Japan: Aoyama Gakuin University)

dimiliki suatu bangsa terkait dalam aspek domestik maupun internasional. kepentingan nasional atau *national interest* adalah tujuan yang ingin dicapai negara melalui upaya diplomasi dalam meminimalisir konflik.¹⁷ Kepentingan nasional terdiri dari ekspresi nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa terkait dalam aspek domestik maupun internasional.

Diplomasi merupakan instrumen utama pelaksanaan politik luar negeri suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional. Nikos Christodoulides memberikan pandangan bahwa diplomasi adalah cara yang dilakukan negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dengan mengirimkan perwakilan khusus untuk bernegosiasi dan bertukar informasi.¹⁸

1.5.2 Teori Diplomasi Publik

Berkembangnya revolusi teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi memunculkan ide diplomasi publik yang menyebabkan aktor-aktor pemerintah/diplomat resmi mengakui relevansi kehadiran aktor-aktor trans-nasional dan aktor non-negara dalam diplomasi internasional. Hal ini perlahan meleburkan batas antara publik dengan pemerintah. Bentuk diplomasi yang bersifat fleksibel dan

¹⁷ J. Peter Pham, "What's in the National Interest? Hans' Moregenthau's Vision and American Foreign Policy" *American*

Foreign Policy Interests 30: 256-265, (2008) 10.

¹⁸ Nikos Christodoulides, "The Internet & Diplomacy," *unc.edu*. March 2005.
http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2005/0103/chri/christo_net.html

informal dengan melibatkan peran publik melatarbelakangi munculnya aktivitas diplomasi publik. Diplomasi publik juga didefinisikan oleh Mark Leonard, sebagai: upaya yang dilakukan negara dalam mempromosikan tujuan nasional melalui interaksi yang dilakukan antar pemerintah dengan melibatkan peran aktor non-negara yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik di negara lain.¹⁹

Nicholas J. Cull berpendapat, bahwa diplomasi publik adalah proses saling mempengaruhi atau *mutual-influence* yang dilakukan negara maupun aktor non-pemerintah dalam membentuk kebijakan untuk memetakan opini positif publik di negara lain.²⁰ Pelaksanaan diplomasi publik perlu bersifat interaktif dan fleksibel dalam membangun hubungan jangka panjang antara negara utama dengan negara tujuan. Diplomasi publik memungkinkan masyarakat, baik secara individu maupun dalam kelompok yang dibentuk pemerintah untuk berperan dalam memberi masukan bagi kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri. Keterlibatan masyarakat yang dirancang oleh pemerintah dalam aktivitas-aktivitas diplomasi publik bertujuan untuk menumbuhkan opini publik yang baik di negara lain.²¹ Ivan Rasmussen mendefinisikan diplomasi publik sebagai strategi diplomasi yang bertujuan untuk mempengaruhi

¹⁹ Nicholas J. Cull, "Public Diplomacy: Seven lesson for its future from its past." (Place Branding and Public Diplomacy:

Macmillan Publishers Ltd Vol-6, 2010) 12

²⁰ Nicholas J. Cull, "Public Diplomacy: Seven lesson for its future from its past." Op.cit

²¹ Sukawarsini Djelantik, "Diplomasi anantara Teori & Praktik," Op.cit.76

publik di negara lain dengan mempromosikan dan memproyeksikan kepentingan negara.²²

Kegiatan pelaksanaan diplomasi publik menurut John Robert Kelley dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, antara lain: (1) *Information* atau Informasi, yaitu: negara melakukan pengelolaan atau manajemen penyampaian informasi dengan menekankan pada suatu peristiwa maupun konflik yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. (2) *Influence* atau Pengaruh, yaitu: negara melakukan upaya persuasi yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan sikap atau opini publik di negara tujuan. (3) *Engagement* atau Keterlibatan, yaitu: negara dalam membangun hubungan jangka panjang dengan negara lain perlu meningkatkan rasa kepercayaan dan pemahaman terhadap publik di negara lain.²³ Berdasarkan ketiga aktivitas diplomasi publik melalui upaya membangun hubungan dengan publik di negara lain, negara dapat mencapai kebijakan luar negeri sebagai tujuan utama dan meningkatkan citra positif suatu negara terhadap negara lain.

1.5.3 Konsep Diplomasi Digital

²² Ivan Willis Rasmussen, "Towards a Theory of Public Diplomacy – A quantitative study of public diplomacy and soft power" (The Fletcher School, 2009) 3

²³ John Robert Kelley, "Between Take-Offs and Crash Landings – Situational Aspec of Public Diplomacy", on Routledge Handbook of Public Diplomacy – Nancy Snow and Phillip M. Taylor (New York: Routledge, 2009) 72-74

Menurut Jan Melissen, diplomasi digital merupakan bagian dari perkembangan diplomasi publik.²⁴ Marcus Holmes berpendapat bahwa dalam perspektif diplomasi publik, pelaksanaan diplomasi digital merupakan strategi yang dilakukan suatu negara dalam menggunakan instrumen teknologi digital berupa: internet dan media sosial. Suatu negara dalam melaksanakan diplomasi digital adalah melalui produksi (*production*), menyebarkan informasi (*dissemination*) serta menjaga arus informasi (*maintenance of knowledge*) yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara menggunakan instrument internet maupun media sosial.²⁵

Manov dan Segev berpendapat bahwa diplomasi digital mengacu pada penggunaan platform media sosial yang dilakukan negara dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Negara melalui diplomasi digital secara proaktif mengelola citra dan reputasi yang dimiliki negara.²⁶ Anthony S. Deos mengemukakan, bahwa diplomasi digital adalah penggunaan internet, teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempengaruhi persepsi, nilai, ide dan perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama atau *mutual understanding*.²⁷

Senada dengan kategori aktivitas pelaksanaan diplomasi publik yang dijelaskan

²⁴ Olubukola S. Adesina. "Foreign policy in an era of digital diplomacy" (Nigeria: University of Ibadan, 2017) 4

²⁵ Marcus Holmes, "Digital Diplomacy and International Change Management", *Op.cit*, 17-18

²⁶ Ilan Manor and Elad Segev, "America's Selfie: How the US portrays itself on its social media accounts" in *Digital Diplomacy Theory and Practice*, ed. Corneliu Bjola and Marcus Holmes (New York: Routledge, 2015) 89

²⁷ Anthony S. Deos, "Digital Diplomacy & Social Capital: Analysing Relational Components of Trust in US & Israeli Online Social Networks" (New Zealand: University of Otago) 40

oleh John Robert Kelley, Corneliu Bjola menjelaskan aktivitas diplomasi digital yang di kategorikan dalam tiga hal, antara lain: *Agenda-setting*, *Presence-expansion* dan *Propagation-routes*.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis menganalisa aktivitas diplomasi digital Pemerintah Jepang pasca bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011 dengan memfokuskan pada dua kategori aktivitas diplomasi digital (*Agenda-setting* dan *Presence-expansion*).

a. *Agenda-setting*

McCombs dan Reynolds mendefinisikan *Agenda-setting* sebagai strategi penyampaian informasi melalui media sosial yang dilakukan oleh suatu negara, terkait topik relevan yang kemudian dapat membangun dan mempengaruhi opini publik di negara lain.²⁹ *Agenda-setting* yang dilakukan pemerintah dalam diplomasi digital adalah penyampaian informasi melalui instrumen media sosial dan situs resmi pemerintah. *Agenda-setting* bertujuan untuk melihat pengaruh pesan dan informasi yang disampaikan pemerintah suatu negara terhadap target publik di negara tujuan.

Aktivitas diplomasi digital dalam *agenda setting* melihat pada pola frekuensi dalam penyampaian informasi atau *posting* terhadap suatu topik dalam jangka waktu tertentu menggunakan media sosial.³⁰ Pemerintah dapat memperluas jangkauan publik di

²⁸ Corneliu Bjola and Lu Jiang, "Social Media and Public Diplomacy – A comparative analysis of the digital diplomatic strategies of the EU, US and Japan in China." in *Digital Diplomacy Theory and Practice*, ed. Corneliu Bjola and Marcus Holmes (New York: Routledge, 2015) 72

²⁹ Olubukola S. Adesina. "Foreign policy in an era of digital diplomacy" (Nigeria: University of Ibadan, 2017) *op.cit.*

³⁰ *Ibid*, p. 82.

negara lain melalui topik relevan yang disampaikan. Aktivitas diplomasi digital dalam *agenda-setting* melalui informasi yang disampaikan oleh perwakilan negara menggunakan media sosial, kemudian menarik perhatian publik dan membangun citra positif suatu negara.

b. *Presence-expansion*

Pemerintah dapat memperluas jangkauan publik di negara lain melalui topik relevan yang disampaikan. Dalam aktivitas diplomasi digital, *presence-expansion* adalah strategi memperluas jangkauan publik di negara lain dengan mengukur pengaruh pesan dan informasi yang diterima oleh publik. Aktivitas diplomasi digital dalam *presence-expansion* menghitung jumlah pesan yang di tuliskan kembali atau *reposting* dari informasi yang disampaikan pemerintah melalui akun media sosial maupun situs resmi pemerintah.³¹

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa data yang berbentuk kategori dengan mendeskripsikan maupun menjabarkan aktivitas

³¹ Corneliu Bjola and Lu Jiang, "Social Media and Public Diplomacy – A comparative analysis of the digital diplomatic strategies of the EU, US and Japan in China." *Op.cit*, 79.

diplomasi digital Jepang yang dilakukan Pemerintah Jepang pasca bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011-2016.

1.6.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan berusaha mengumpulkan data berupa fakta untuk menjabarkan serta menjelaskan : Aktivitas diplomasi digital Jepang pasca bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011-2016.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka dengan menggunakan buku maupun jurnal yang membahas mengenai topik terkait Diplomasi Digital Jepang.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan membagi bentuk penelitian menjadi lima bab untuk menjelaskan mengenai topik penelitian berjudul “**Aktivitas Diplomasi Digital Pemerintah Jepang pasca Bencana Alam The Great East Japan Earthquake 2011-2016**”

Bab I pendahuluan, penulis akan menjelaskan mengenai topik dengan lingkup permasalahannya, yang diawali dengan latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah yang membagi periode dalam pembatasan masalah dan perumusan masalah berupa pertanyaan penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian dijelaskan berikutnya. Kemudian penulis akan membahas mengenai kajian pustaka atau *literature review* serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar penjelasan terhadap fenomena yang diteliti. Selanjutnya, peneliti akan menjabarkan metode penelitian dan teknik pengumpulan data maupun sistematika pembahasan.

Bab II dalam penelitian ini akan membahas mengenai diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang, yang diawali dengan kepentingan nasional Jepang. Kemudian, penelitian ini akan menjelaskan tentang diplomasi Jepang pada tahun 1950 hingga 1990. Diplomasi Jepang pada tahun 1990 hingga tahun 2007 akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian diplomasi Jepang pada Tahun 2007-Sekarang dan Digitalisasi dalam Diplomasi Jepang,

Bab III dalam penelitian ini membahas tentang bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011 dengan diawali tentang penjelasan kondisi sebelum terjadinya bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011. Kemudian, kondisi sesudah bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011 akan dijelaskan selanjutnya. Respon Pemerintah Jepang dalam menghadapi bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011 dan respon publik terhadap bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011,

Bab IV dalam penelitian ini akan menganalisa mengenai aktivitas diplomasi digital Pemerintah Jepang pasca bencana alam The Great East Japan Earthquake dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Penulisan ini akan diawali dengan membahas mengenai kebijakan luar negeri Jepang dalam upaya revitalisasi wilayah Fukushima pasca bencana alam The Great East Japan Earthquake 2011. Kemudian, penjelasan tentang aktivitas diplomasi digital Pemerintah Jepang pasca bencana alam The Great East Japan Earthquake melalui media sosial twitter, facebook, dan youtube. Analisa terhadap aktivitas diplomasi digital oleh Pemerintah Jepang dalam *Agenda-setting* dan aktivitas diplomasi digital Pemerintah Jepang dalam *Presence-expansion*. Analisa dalam Bab IV ini, dilengkapi dengan tabel aktivitas diplomasi digital oleh Pemerintah Jepang periode tahun 2011-2016.

Bab V Kesimpulan.